



## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik

Jurnal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration>

## Implementasi Program Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) berbasis web di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Badung

*I Wayan Dharmawan, A.A. Gede Raka dan I Made Mardika*

Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

Correspondence E-mail: [wawan19730114@gmail.com](mailto:wawan19730114@gmail.com)**Abstract**

*Employee Affair management Badung Regency arranged with Employee Affair Information Management System (SIMPEG) based on website. Employee Affair and Human Resource Developing Department of Badung Regency as Program implementation effort to improving employee administration and management in a manner fast, right and accurate. The program performance goes well even though not yet reached optimal result. Analysis effectiveness of the policy implementation program at Employee Affair and Human Resource Developing Department of Badung Regency is the research effort. Two point of problem under studied are (1) Employee Affair Information Management System (SIMPEG) program based on website by Employee Affair and Human Resource Developing Department of Badung Regency implementation effectiveness and (2) influencing factors of implementation Employee Affair Information Management System (SIMPEG) program. Research aims are to know Employee Affair Information Management System (SIMPEG) programs implementation effectiveness-based website at Employee Affair and Human Resource Developing Department of Badung Regency and influencing factors which is an obstacle of implementation Employee Affair Information Management System (SIMPEG) program. Qualitative Descriptive Method approach is using on this research with the application of Edward III Theory and Bambang Sunggono Theory. Observation technique, deep interview and documentation are used as data collection. Technique purposive sampling is used for selection of informants and data analysis with inductive qualitative. Research result indicate that Employee Affair Information Management System (SIMPEG) program implementation based on website are running as effective, corresponding to four element which determine policy implementation that is communication, resource, disposition and bureaucratic structure. Inhibiting factors of SIMPEG program implementation based on website at Employee Affair and Human Resource Developing Department of Badung Regency are policy content, Human Resources supporting, infrastructure and communication.*

**Keywords:** Implementation, SIMPEG, program based on website**Abstrak**

Pengelolaan data kepegawaian, Kabupaten Badung dilakukan dengan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) berbasis web. Pelaksanaan program oleh Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Badung berupaya meningkatkan manajemen dan administrasi kepegawaian secara cepat, tepat dan akurat. Kendatipun program ini telah terlaksana dengan baik, namun belum mencapai hasil yang optimal. Penelitian ini berupaya menganalisis efektivitas implementasi kebijaksanaan program di BKPSDM Kabupaten Badung. Dua masalah yang dikaji adalah: (1) efektivitas implementasi program SIMPEG berbasis web di BKPSDM Kabupaten Badung, dan (2) Faktor-faktor yang

mempengaruhi implementasi program SIMPEG tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas implementasi program SIMPEG berbasis web di BKPSDM Kabupaten Badung dan faktor-faktor yang menjadi menghambat implementasi program SIMPEG berbasis web di BKPSDM Kabupaten Badung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan penerapan teori Edwards III dan teori Bambang Sunggono. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, dan analisis data dengan kualitatif bersifat induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program SIMPEG berbasis web di BKPSDM Kabupaten Badung sudah berjalan cukup baik sesuai dengan empat unsur yang menentukan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi program SIMPEG berbasis web di BKPSDM Kabupaten Badung menyangkut isi kebijakan, dukungan SDM, sarana prasarana dan komunikasi.

**Kata kunci:** Implementasi, SIMPEG, program berbasis web

---

**How to Cite:** Dharmawan, I, W., Raka, A, A, G & Mardika, I, M. (2019). Implementasi Program Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) berbasis web di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Badung . *PUBLIC INSPIRATION: Jurnal Administrasi Publik* 4 (1): 31-38

---

## 1. Pendahuluan

Berdasarkan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 telah diubah dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kabupaten dan kota berdasarkan daerah desentralisasi. Dengan digunakan asas desentralisasi pada kabupaten dan kota, maka kedua daerah tersebut diberikan wewenang untuk mengatur, mengurus, mengendalikan, dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip otonomi daerah pada Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berarti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus sendiri semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) merupakan penerapan *e-Government* dalam pemerintahan yang berfungsi untuk mengelola data, manajemen dan administrasi kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah. SIMPEG diselenggarakan dalam mengelola data kepegawaian secara cepat, tepat dan akurat untuk mendukung kebijaksanaan manajemen administrasi kepegawaian.

Tujuan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) adalah dapat terwujudnya suatu sistem informasi manajemen yang berintegrasi dalam suatu jaringan komputer yang mampu menghasilkan informasi yang bermutu untuk menunjang pengambilan keputusan manajemen kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah. Sedangkan tujuan khususnya antara lain menghasilkan data kepegawaian yang valid untuk membantu pimpinan dalam merencanakan penyusunan formasi, pengadaan, mutasi, promosi/demosi dan pengembangan karier pegawai di masa yang akan datang.

Untuk menyeragamkan laporan kepegawaian dan aplikasi SIMPEG di Indonesia, Menteri Dalam Negeri RI sebagai induk dari pemerintah daerah propinsi, kabupaten dan kota di Indonesia telah menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah daerah. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang selanjutnya disingkat SIMPEG adalah suatu totalitas yang terpadu terdiri atas perangkat pengolah meliputi pengumpul, prosedur, tenaga pengolah dan perangkat lunak; perangkat penyimpanan meliputi pusat data dan bank data serta perangkat komunikasi yang saling berkaitan, ketergantungan dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi di bidang kepegawaian. Tujuan SIMPEG dalam Kepmendagri adalah terciptanya database kepegawaian mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Propinsi dan Departemen Dalam Negeri yang dapat menampung, mengolah, menyimpan, menemukan kembali dan mendistribusikan data pegawai.

Pemerintah Propinsi Bali telah membangun dan pengembangan SIMPEG sejak tahun 1994 dan sampai

saat ini masih aktif dengan SIMPEG berbasis web. Tujuan dibangun SIMPEG untuk mendukung pemantapan administrasi kepegawaian yaitu pengumpulan dan pengolahan data kepegawaian yang bersifat standar dan seragam. SIMPEG memuat database pegawai seperti data pokok PNS, biodata PNS, data gaji, jabatan, pangkat, hubungan keluarga dan unit kerja. Selanjutnya dilaksanakan pengembangan SIMPEG hingga saat ini melalui kegiatan pemutakhiran database pegawai, perubahan kodefikasi pada tabel-tabel dan perubahan jenis data, elemen data dan struktur database pegawai.

Sama halnya dengan Pemerintah Propinsi Bali, di Pemerintah Kabupaten Badung telah membangun dan mengembangkan SIMPEG sejak tahun 1995 dan sampai saat ini masih berlanjut. Karena ruang lingkup pekerjaan yang begitu luas dan koordinasi masing-masing bidang tidak optimal, maka tahun 2015 BKPSDM (dahulu BKD, Diklat) Kabupaten Badung mengembangkan SIMPEG berbasis web dengan alamat website [www.badungkab.go.id/instansi/bkpsdm](http://www.badungkab.go.id/instansi/bkpsdm). Dengan SIMPEG berbasis web diharapkan pelayanan administrasi kepegawaian pada BKPSDM Kabupaten Badung lebih cepat, tepat, akurat dan akuntabel. Serta didukung oleh pengolahan dan penyempurnaan (*updating*) data kepegawaian terintegrasi yang mampu memberikan informasi data kepegawaian yang akurat dan realtime sehingga tujuan BKPSDM Kabupaten Badung untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean governance*), transparan, akuntabel dan professional terwujud.

Namun dalam kenyataannya bahwa implementasi SIMPEG berbasis web di BKPSDM Kabupaten Badung masih mengalami berbagai kendala, sehingga pengelolaan administrasi kepegawaian terutama pengolahan data kepegawaian tidak dapat terlaksana dengan maksimal. Pertama, di mana data kepegawaian sangat fluktuatif (perubahan data kadang bertambah kadang berkurang setiap saat) dan dinamis (bergerak terus) seiring dengan perkembangan jaman dan arus teknologi globalisasi. Data Kepegawaian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan informasi kepegawaian seseorang. Informasi yang dimaksud berkaitan dengan Nama, NIP, Alamat, Jumlah Keluarga, SK CPNS, SK PNS, Kepangkatan, Jabatan, Organisasi atau Unit Kerjanya, Gaji, Jenjang dan Tingkat Pendidikan, serta Diklat-diklat yang pernah diikuti baik teknis maupun fungsional (modul pelatihan SIMPEG, 2000). Kedua, begitu dinamisnya data kepegawaian membuat data yang dimiliki oleh masing-masing pegawai menjadi kurang lengkap (*update*). Ini dapat dilihat dari laporan prosentase dalam SIMPEG berbasis web, pegawai yang telah menyempurnakan data kepegawaian di Kabupaten Badung pada bulan Juli 2018 sebesar 53,5% dari total jumlah pegawai Pemerintah Kabupaten Badung 8.354 orang.

Dengan belum lengkap data kepegawaian dalam SIMPEG berbasis web menyebabkan informasi data kepegawaian pada Pemerintah Kabupaten Badung belum akurat dan valid. Di samping data belum valid, dukungan SDM yang memiliki pendidikan TI yang ada sebanyak 4 (empat) orang namun belum memiliki kompetensi programmer dan masih bergantung pihak ketiga (rekanan). Demikian pula koordinasi antar bidang di BKPSDM Kabupaten Badung belum berjalan optimal maksudnya di BKPSDM Kabupaten Badung terdiri dari 3 (tiga) bidang dan sekretariat, tiap bidang mempunyai tupoksi (tugas, pokok dan fungsi) masing-masing harus dilaksanakan namun belum berjalan optimal. Disamping itu pula terjadi perubahan struktur kelembagaan juga mempengaruhi kevalidan data kepegawaian maksudnya setiap ada perubahan struktur kelembagaan proses menginput mutasi jabatan struktural maupun fungsional membutuhkan waktu yang cukup lama.

Penulis tertarik mengkaji permasalahan ini, disebabkan karena implementasi program SIMPEG berbasis web di BKPSDM Kabupaten Badung masih mengalami kendala maupun permasalahan. Disamping permasalahan tersebut di atas, juga permasalahan yang lain diantaranya koordinasi antar bidang di BKPSDM masih lemah terutama dalam melaksanakan tupoksi masing-masing. Pimpinan dalam hal ini Kepala BKPSDM sudah memberikan pengarahan maupun instruksi untuk melaksanakan koordinasi secara optimal namun dalam implementasinya masih belum optimal. Padahal SIMPEG sudah memberikan kemudahan-kemudahan dengan fasilitas-fasilitas menu sesuai kebutuhan masing-masing bidang.

Berdasarkan identifikasi di atas permasalahan adalah Bagaimanakah implementasi program SIMPEG berbasis web di BKPSDM Kabupaten Badung ? dan Faktor-faktor apa yang menghambat implementasi program SIMPEG berbasis web di BKPSDM Kabupaten Badung ?. Adapun Tujuan penelitian ini dibagi 2 yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah untuk memahami implementasi kebijakan pada instansi pemerintah di Pemerintah Kabupaten Badung, sedangkan tujuan khususnya adalah (1) Untuk mengetahui implementasi program SIMPEG berbasis web di BKPSDM Kabupaten Badung dan (2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat implementasi program SIMPEG berbasis web di BKPSDM Kabupaten Badung.

## 2. KONSEP

### Implementasi Kebijakan Publik

Secara umum, istilah "kebijakan" atau "*policy*" dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Menurut James Andersen, kebijakan publik meliputi segala sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah.

Implementasi kebijakan merupakan suatu analisis dengan lebih melakukan retropeksi dari pada prospeksi dengan tujuan ganda, yaitu pertama memberi informasi bagaimana program-program tersebut dapat terlaksana, kedua menunjukkan faktor-faktor yang dapat diubah agar diperoleh capaian hasil yang lebih baik yang dapat memberikan perubahan implementasi atau program baru.

Sebagaimana Budi Winarno (2012:158) menyatakan proses implementasi memiliki variabel atau faktor yang membentuk kaitan (*linkage*) antara kebijakan dan pencapaian (*performance*). Variabel tersebut merupakan variabel bebas dan variabel terikat yang saling berhubungan satu sama lainnya.

Menurut Edwards (dalam Budi Winarno, 2012 : 177), studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi *public administration* dan *public policy*. Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya.

Implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta, sehingga pada akhirnya akan mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.

### Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)

Sistem informasi terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu sistem dan informasi. Sistem dapat diartikan sebagai suatu kesatuan dari orang yang sistematis dan ter-struktur serta menjalankan fungsi untuk mencapai suatu tujuan tertentu, sedangkan informasi dapat diartikan sejumlah data yang telah diolah dan memiliki kegunaan untuk suatu tujuan tertentu. Sehingga Sistem informasi didefinisikan sebagai perangkat lunak yang membantu mengatur dan menganalisa data.

Pengertian SIMPEG berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Depdagri dan Pemda menyebutkan bahwa: "Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) adalah suatu totalitas yang terpadu yang terdiri atas perangkat lunak; perangkat penyimpanan meliputi pusat data dan bank data serta perangkat komunikasi yang saling berkaitan, bergantung, dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi di bidang kepegawaian".

### Program Berbasis web

Dalam perangkat lunak (software), aplikasi berbasis web adalah aplikasi yang dapat diakses menggunakan penjelajah web (web browser) melalui jaringan seperti internet atau intranet. Aplikasi berbasis web juga merupakan aplikasi perangkat lunak komputer yang dikodekan dalam bahasa pemrograman yang didukung penjelajah web (web browser) seperti HTML, ASP, Perl, Java, Java Script, PHP, Python, Ruby dan bahas pemrograman lainnya.

## 3. Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis deskriptif. Moleong (2012:6) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, dan analisis data dengan kualitatif bersifat induktif. Teknik pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi.

## 4. Hasil dan Pembahasan



## **Implementasi Program Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) berbasis web di BKPSDM Kabupaten Badung**

Implementasi program SIMPEG berbasis web di BKPSDM Kabupaten Badung dianalisis melalui sudut teori implementasi kebijakan publik dari George C Edwards ( Edwards III ) yang mencakup unsur komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Masing-masing unsur tersebut berdasarkan data empiris di BKPSDM Kabupaten Badung, adalah sebagai berikut :

### **Komunikasi**

Implementasi program SIMPEG berbasis web dapat berjalan efektif bila proses komunikasi yang dilakukan di BKPSDM Kabupaten Badung dalam melaksanakan tugasnya dilakukan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan tupoksinya yang ada. Komunikasi dalam implementasi program SIMPEG berbasis web dapat dilakukan dengan penyampaian informasi yang jelas dan adanya konsistensi penyampaian informasi secara baik akan mendorong aparatur untuk lebih meningkatkan pelayanannya. Penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik juga. Dalam penyaluran komunikasi seringkali terjadi permasalahan ini disebabkan adanya salah pengertian (miskomunikasi) karena semakin banyak lapisan birokrasi yang harus dilewati dalam proses komunikasi, maka semakin besar peluang perintah diabaikan dan distorsi di tengah jalan.

Dalam proses komunikasi diperlukan atau melibatkan tiga unsur penting, yaitu : (a) penyaluran (transmisi), (b) kejelasan tujuan, (c) konsistensi. Pada implementasi program SIMPEG berbasis web di BKPSDM Kabupaten Badung penyampaian informasinya melalui rapat-rapat intern maupun ekstern. Rapat tersebut baik rapat rutin maupun rapat koordinasi kepegawaian. Dalam rapat-rapat tersebut dijelaskan dan disosialisasikan tujuan SIMPEG, kegunaannya, aturan pelaksanaannya dan cara mengoperasikannya. Pada konsistensi, implementasi SIMPEG berbasis web berpedoman pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2000 dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sesuai struktur organisasi BKPSDM dan OPD.

Berdasarkan penjelasan ketiga faktor yang mempengaruhi komunikasi yaitu transmisi, kejelasan tujuan, dan konsistensi, maka dapat diketahui bahwa komunikasi dalam implementasi program SIMPEG berbasis web di BKPSDM Kabupaten Badung sudah berjalan dengan cukup baik.

### **Sumber Daya**

Dalam implementasi program SIMPEG berbasis web di BKPSDM Kabupaten Badung, sumber daya yang dapat menentukan keberhasilan implementasi tersebut dalam menciptakan efektivitas kerja, sumber daya tersebut terdiri atas : (1) staf, (2) informasi, (3) wewenang, dan (4) fasilitas.

Staf, berdasarkan dari data kepegawaian Pemerintah Kabupaten Badung keadaan Desember 2018 diketahui bahwa BKPSDM Kabupaten Badung memiliki sumber daya manusia (staf) berjumlah 72 orang. Berdasarkan pada tingkat pendidikan seluruh PNS-nya memiliki ijazah minimal tingkat SMA sederajat. Mayoritas PNS berpendidikan Sarjana (S-1) sebanyak 33 orang dengan prosentase 45,83%. Dari 33 orang sarjana (S-1), lima orang bergelar Sarjana Komputer namun belum memiliki kompetensi programmer yang tersebar di masing-masing bidang dan sekretariat. Kalau masalah staf, ada dua sisi yaitu kuantitas dan kualitas. Kuantitas, untuk saat ini staf yang ada sudah cukup memadai. Kalau masalah kualitas, untuk menambah kompetensi mereka dikirim untuk mengikuti bintek, pelatihan-pelatihan atau diklat yang terkait dengan program SIMPEG.

Untuk menunjang pelaksanaan implementasi program SIMPEG berbasis web di BKPSDM Kabupaten Badung, informasi yang digunakan melalui media sosial dalam bentuk grup Whatsapp (WA) dan email. Media sosial ini digunakan sebagai wahana komunikasi mengenai permasalahan-permasalahan terkait implementasi program SIMPEG berbasis web. Media sosial ini operator-operator SIMPEG dapat melakukan konsultasi dan usul perbaikan data kepegawaian pada program SIMPEG berbasis web. Penyampaian informasi melalui grup WA dan email sudah berjalan baik dan cukup efektif.

Pada implementasi program SIMPEG berbasis web di BKPSDM Kabupaten Badung, pada internal BKPSDM kewenangannya sudah cukup jelas sesuai dengan tupoksi masing-masing bidang, namun dalam koordinasi perlu ditingkatkan dan dimantapkan.

Fasilitas-fasilitas dalam implementasi program SIMPEG berbasis web terbagi dalam 2 bagian yaitu fasilitas fisik dan fasilitas aplikasi. Fasilitas fisik merupakan sarana dan prasarana kerja sudah cukup memadai untuk

menunjang keberhasilan implementasi program SIMPEG berbasis web di BKPSDM Kabupaten Badung. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah meja dan kursi, seperangkat komputer, laptop, printer, jaringan internet, listrik, dan telepon. Setiap pegawai admin telah dilengkapi dengan seperangkat komputer dan/atau laptop. Jaringan LAN dan wifi tersambung ke seluruh ruangan yang ada di Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Badung dan kantor kecamatan maupun kelurahan serta di sekolah-sekolah. Sedangkan fasilitas aplikasi tidak kalah pentingnya karena merupakan roh dari kebijakan ini. Adapun fasilitas aplikasi ini adalah program SIMPEG itu sendiri yang berbasis web dan dapat diakses melalui website BKPSDM [www.badungkab.go.id/instansi/bkpsdm](http://www.badungkab.go.id/instansi/bkpsdm).

#### Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi sebagai pelaksana kebijakan memiliki peranan penting dalam implementasi program SIMPEG berbasis web ini. Salah satu aspek yang terpenting dalam BKPSDM Kabupaten Badung adalah adanya pembagian tugas dan *standard operational procedure* (SOP).

Bahwa pada pembagian tugas sesuai dengan struktur organisasi BKPSDM dan tupoksinya sudah berjalan dengan baik, namun koordinasi perlu ditingkatkan.

SOP adalah suatu standar atau pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu instansi untuk mencapai tujuannya. SOP merupakan tata cara atau tahapan yang dibakukan dan harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. Implementasi program SIMPEG berbasis web sudah ada SOP-nya. Dengan SOP menjadi acuan dan memudahkan dalam melaksanakan kegiatan maupun tugas. Dengan SOP, tata cara dan waktu yang dibutuhkan dalam implementasi program SIMPEG berbasis web sudah jelas dan transparan.

#### Disposisi

Disposisi mencakup pengangkatan birokrasi dalam hal ini pengangkatan admin dan operator SIMPEG dan insentif. Pada pengangkatan dan penunjukan admin dan operator SIMPEG sesuai dengan bidang tugas staf tersebut. Disamping itu, staf tersebut mempunyai kemampuan dan komitmen. Pengangkatan admin maupun operator SIMPEG sudah berjalan cukup baik, namun komitmennya perlu ditingkatkan.

Untuk saat ini, admin dan operator SIMPEG belum dapat insentif khusus, namun seluruh pegawai Pemerintah Kabupaten Badung sudah mendapatkan tunjangan beban kerja.

### **Faktor-Faktor yang Menghambat Implementasi Program SIMPEG Berbasis Web di BKPSDM Kabupaten Badung**

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa implementasi program SIMPEG berbasis web di BKPSDM Kabupaten Badung sudah berjalan dengan cukup baik. Akan tetapi masih dijumpai sejumlah kendala-kendala yang ada dalam implementasi menjadi faktor penghambat dalam keberhasilan implementasi program SIMPEG berbasis web di BKPSDM Kabupaten Badung.

Berikut ini akan di analisis faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi program SIMPEG berbasis web di BKPSDM Kabupaten Badung mengacu kepada teori menurut Bambang Sunggono. Terdapat empat unsur yaitu (1) Isi kebijakan, (2) Informasi, (3) Dukungan, (4) Pembagian Potensi.

#### Isi Kebijakan

Dalam isi kebijakan dijumpai beberapa kendala yaitu untuk mengantisipasi data kepegawaian yang fluktuatif dan dinamis dibutuhkan computer server yang mempunyai kapasitas penyimpanan lebih besar dan lebih cepat aksesnya. Untuk skala prioritas, update data kepegawaian belum optimal, dilihat dari data jumlah pegawai yang melaksanakan update data sebanyak 53,5% (4469 orang) dari jumlah pegawai seluruhnya 8354 orang dan batas waktu update data sudah molor. Dalam implementasi program SIMPEG berbasis web belum diterbitkan SK Bupati Badung dan masih mengacu pada aturan dipusat Permendagri Nomor 17 Tahun 2000. Pada pelaksanaan implementasi program SIMPEG berbasis web masih ada kekurangan baik pada data kepegawaiannya maupun aplikasinya. Disamping kendala-kendala di atas, kendala lainnya pada isi kebijakan yaitu waktu pelaksanaan dan sumber daya manusia.

#### Informasi

Pada penyampaian informasi program SIMPEG belum optimal, hal ini disebabkan karena pada saat rapat koordinasi dan sosialisasi diwakilkan. Akibatnya informasi terkait program SIMPEG yang diinginkan tidak berjalan sesuai dengan rencana.

#### Dukungan

Implementasi program SIMPEG berbasis web di BKPSDM Kabupaten Badung belum didukung oleh SK Bupati Badung sebagai acuan atau dasar hukum pelaksanaan program SIMPEG berbasis web. Pada saat ini, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2000

#### Pembagian Potensi

Pembagian potensi sudah jelas sesuai dengan struktur organisasi, namun dalam pelaksanaan koordinasi perlu ditingkatkan. Kendala lain yaitu penunjukkan admin dan operator SIMPEG belum dilengkapi SK Bupati Badung.

### 5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai implementasi program SIMPEG berbasis web di BKPSDM Kabupaten Badung dapat ditarik simpulan sebagai berikut: Implementasi program SIMPEG berbasis web di BKPSDM Kabupaten Badung berdasarkan unsur komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sudah berjalan cukup baik. Unsur-unsur implementasi tersebut meneguhkan kembali tesis yang dikemukakan oleh Edwards III. Namun dalam penerapannya, masih dijumpai sejumlah kendala terutama terkait dengan penambahan SDM yang mempunyai kompetensi programmer, komitmen pelaksana, penambahan kapasitas server, pengangkatan admin dan operator SIMPEG dengan SK Bupati Badung, dan koordinasi admin antar bidang di BKPSDM.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi program SIMPEG berbasis web di BKPSDM Kabupaten Badung menyangkut unsur isi kebijakan, informasi, dukungan dan pembagian potensi. Empat faktor kendala tersebut, antara lain: (a) isi kebijakan menyangkut penetapan skala prioritas yang lebih terukur, (b) penyampaian informasi yang akurat kepada operator SIMPEG, (c) dukungan legalitas pelaksana, dan pembagian potensi terkait dengan komitmen pelaksana program maupun pengguna program SIMPEG berbasis web di pemerintah Kabupaten Badung.

Berdasarkan hasil dan pembahasan serta simpulan, maka peneliti memberikan saran kepada pemerintah Kabupaten Badung, agar dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaksanaan program SIMPEG berbasis web. Dimensi kuantitas menyangkut tentang dukungan SDM, alokasi dana, dan fasilitas pendukung yang memadai. Dimensi kualitas terkait dengan pengangkatan/penunjukan SDM pelaksana, dan kapasitas maupun mutu program sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih baik di bidang SDM yang dimiliki. Kepada Pelaksana program terutama BKPSDM dapat meningkatkan komitmen, tanggung jawab pengelolaan, dan pendataan administrasi kepegawaian secara optimal sehingga mampu meningkatkan kinerja lembaga. Kepada masyarakat, agar dapat memanfaatkan program ini (mengakses) guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan terkait dengan keadaan pegawai di Pemerintah Kabupaten Badung.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. Khoirul. 2004. *Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintahan di Era Otonomi Daerah, SIMDA*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anderson, James E. 2005. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Abdul Wahab, S.. 2008, *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : CV. Afabeta.
- Dunn, William N.. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : PT Hanindita Graha Widya.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington D.C: Congressional Quarterly Inc.

- Efendy, Onong Uchjana. 2009, *Dimensi-Dimensi Komunikasi*, Bandung: Remadja Karya.
- Indrajit, Richardus Eko, et all.. 2004. *Electronic Government : Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Jogiyanto. 2001. *Analisis dan Desain, Sistem Informasi : Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis*. Yogyakarta : Ansi Offset.
- Kadir, Abdul. 2003. *Pengenalan Sistem Informasi*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Muhajir. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Diterjemahkan T.R. Rohidi. Jakarta : UI Pres
- McLeod Jr., Raymond. 1995. *Management Information System, A Study Of Computer-Based Information System*. 6<sup>th</sup> Edition, New Jersey : Prentice-Hall inc.
- Moleong, Lexy J.. 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nugroho. 1987. *Metode Penelitian Survey*, Lembaga Penelitian. Jakarta : Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Nasikun. 2007, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Priyanto, Eko. 2008. *Pengantar Sistem Informasi Manajemen Pegawai*.  
<http://www.gecko.web.id/implementasi-ti/pengantar-sistem-informasi-manajemen-pegawai/> diakses tanggal 14 Desember 2018.
- Siagian, Sondang P. 1981. *Sistem Informasi untuk Pengambilan Keputusan*. Jakarta : Gunung Agung.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Susanto, Azhar. 2004. *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung : Lingkar Jaya.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Winarno, Budi. 2012. *Teori, Proses dan Studi Kasus Kebijakan Publik*. Yogyakarta : CAPS.
- Dokumen-dokumen**
- Undang-undang Republik Indonesia No 5 Tahun 2014 tentang ASN (Aparatur Sipil Negara);
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang *Sistem Informasi Manajemen Pegawai Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah*;
- Instruksi Presiden Nomor. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E – Government*.
- , 2000. *Modul Pembekalan SIMPEG*. Departemen Dalam Negeri.